JANUARI - MARET 2018, OMBUDSMAN KALSEL TERIMA 31 LAPORAN MASYARAKAT

Senin, 12 Maret 2018 - Rizki Arrida

Eksistensi Ombudsman RI yang sudah menginjak usia 18 tahun di Indonesia, semakin dibutuhkan masyarakat. Faktanya, lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik seluruh Indonesia, termasuk BUMD dan BUMN serta perorangan yang bersumber dari APBN dan APBD, dibentuk berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Selama Januari hingga Maret 2018, laporan yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Kalsel tercatat sebanyak 31 laporan, belum termasuk pengaduan masyarakat atas kinerja pelayanan publik di instansi sebanyak 60 aduan.

"Ini makin membuktikan keberadaan Ombudsman semakin dibutuhkan masyarakat. Banyak yang datang ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalsel melaporkan dugaan maladministrasi serta pelayanan publik yang masih buruk dan tak sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," ucap Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel Noorhalis Majid kepada jejakrekam.com, usai perayaan Hari Jadi Ombudsman RI ke-18 yang diperingati dalam upacara bendera di kantornya Jalan Letjend. S. Parman No. 57, Banjarmasin, Senin (12/3/2018).

Dengan mengenakan seragam batik Ombudsman, seluruh insan lembaga pengawas pelayanan publik ini mengikuti upacara tersebut dengan khidmat.

"Tantangan Ombudsman ke depan semakin berat. Sebab, masyarakat tentu menginginkan pelayanan publik yang semakin baik. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi ini merupakan bukti kesadaran publik akan hak-haknya juga semakin baik," ucap Noorhalis Majid.

Untuk itu, jebolan STIE Indonesia Banjarmasin ini menginginkan agar jajarannya bukan hanya bisa menyelesaikan laporan masyarakat, namun juga mencegah praktik maladministrasi.

"Ini berarti Ombudsman harus mendorong, memotivasi, dan membantu penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi. Minimal terhindar dari maladministrasi, atau lebih dari itu; pelayanan yang prima, inovatif dan sebagainya," imbuhnya.(jejakrekam)